

DAFTAR PUSTAKA

- Antari, Ni Putu Gina Sukma. 2018. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Unud*. Vol.7 No.2.
- Budianto. 2016. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara". *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*. Vol.4 No.4.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2020. *Postur APBD*. (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id>). Diakses pada Juni 2020.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi sektor publik : akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Heryanti, Chrisna Dwi. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur". *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*. Vol.3. No.1.
- Mahmudi. 2017. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. 2017. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Masdiantini, Putu Riesty. 2016. "Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan dan Opini Audit BPK Pada Kinerja Keuangan". *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.14 No.2.
- Nugroho, Tatas Ridho. 2018. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur". *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*. Vol.7 No.1.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 *tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Saraswati, Dwi. 2019. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah". *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*. Vol.9 No.2.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Penyusun. 2019. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi-2019*. Palembang: Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintahan Daerah.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*